



RIWAYAT HIDUP PENULIS



OTRIANA PERMATA SARI, lahir di Jakarta, 7 Juli 1987. Ia menamatkan pendidikan dasar di SDI Al-Azhar 2 (1999), SMPN 109 (2002), SMAN 61 (2005), dan Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (2009). Semasa kuliah, Ia aktif dalam UKM Marching Band MBUI dan Liga Tari Krida budaya yang mengantarkannya sebagai juara tiga di perlombaan Grand Prix Marching Band se-Indonesia (2006) dan juara umum pada *Colour Guard Contest* (2007). Selain aktif di UKM UI, Ia juga menjabat sebagai Humas IKSI periode 2007-2008 dan Koordinator Humas dan Publikasi dalam acara ITP (2008). Selama proses penulisan skripsi, Ia juga bekerja sebagai reporter dan *content* di majalah OUCH!



3.1.1 (Artikel dalam koran *Media Indonesia* edisi Selasa, 28 April 2009)

Presiden Mahkamah Pidana Internasional ke Indonesia

PRESIDEN Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Sang Hyun-song mengunjungi sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Dalam kunjungannya di Jakarta, hari ini, Song akan berpartisipasi dalam pertemuan dengan Koalisi Masyarakat Indonesia untuk ICC.

Pada Rabu (29/4) dan Kamis (30/4), Presiden ICC itu bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintahan Indonesia dan anggota DPR dalam membahas proses ratifikasi Statuta Roma atau statuta yang mengatur tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Sementara itu, pemerintah Indonesia telah memasukkan agenda untuk meratifikasi Statuta Roma dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009. (Ant/P-2)

3.1.2 (Artikel dalam koran *Media Indonesia* edisi Selasa, 28 April 2009)

41 Perusahaan Masuk Blacklist ADB

BANK Pembangunan Asia (ADB) memasukkan 41 perusahaan dan 38 perorangan ke *blacklist* atau daftar hitam bank itu pada 2008 terkait dengan kasus korupsi atas dana lembaga keuangan yang berkantor pusat di Manila itu. Mereka dilarang ikut serta dalam kegiatan ADB.

"Jumlah itu berasal dari semua anggota ADB, ini merupakan *Laporan Tahunan Unit Integritas ADB* pada 16 Februari 2009," kata External Relations Officer ADB Ayun Sundari di Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, Koalisi Anti Utang (KAU) menilai pinjaman yang diberikan ADB malah memperburuk kualitas hidup masyarakat. Proyek ADB di sektor energi dan program perubahan iklim, yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan eksploitasi alam secara besar-besaran, juga turut dikecam KAU.

Juru bicara KAU Dani Setiawan mencontohkan proyek penggarapan industri ekstraktif gas Tangguh yang turut dibiayai ADB senilai US\$350 juta. Proyek itu telah menyebabkan 110 keluarga atau 511 penduduk tanah merah terusir dari tempat tinggal mereka sejauh 3,5 kilometer. (Tup/OL/E-6)

3.1.3 (Artikel dalam koran *Media Indonesia* edisi Selasa, 28 April 2009)

Banyak Perusahaan Indonesia Terkait Tax Havens Country

BANYAK perusahaan di Indonesia terkait dengan negara-negara yang menjadi surga bagi penghindaran pajak (*tax havens country*).

"Jangan nilai bahwa itu hanya dilakukan oleh perusahaan atau orang asing. Perusahaan-perusahaan kita semuanya pasti terkait dengan *tax havens country*. Juga konglomerat-konglomerat kita," kata Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution di Gedung Departemen Keuangan (Depkeu), Jakarta, kemarin.

Menurut dia, untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak yang sifatnya sudah lintas negara, pihaknya mengusulkan penempatan intelijen ekonomi di berbagai negara yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan Indonesia termasuk di *tax havens country*.

"Ini untuk menghindari adanya praktik tidak benar, untuk mengurangi berbagai teknik mereka, agar membayar pajaknya rendah."

Menurut dia, penempatan intelijen ekonomi dari Direktorat Jenderal Pajak tidak mesti di setiap negara dan tidak perlu juga di setiap *tax havens country*.

"Itu ditempatkan di negara-negara yang investornya banyak ke sini. Ini kan banyak sekali perusahaan kita yang kalau kalian lihat struktur kepemilikan itu bercabang-cabang semua, dan selalu



MIM SOLEH

Darmin Nasution
Direktur Jenderal Pajak

ada yang ditempatkan di *tax havens country*," katanya.

Ia menyebutkan, terhadap perkembangan semacam itu, pihaknya perlu mengumpulkan informasi dan data untuk mengikuti perkembangannya.

"Arahnya lebih ke intelijen, itu intelijen ekonomi, bukan intelijen pemeriksa atau penyidik," katanya.

Ketika ditanya mengenai sudah adanya tukar-menukar informasi data antarnegara, Darmin mengatakan urusannya akan lama jika menggunakan mekanisme itu. Apalagi jika baru tahap pengumpulan data.

"Anda bisa meminta mereka kalau punya informasi dasar, baru menanyakan lebih jauh. Tapi kalau mau dari awal, ya enggak bisa."

Ketika ditanya kapan realisasi penempatan intelijen itu, Darmin mengatakan harus dibicarakan dulu dengan Departemen Luar Negeri. "Dia akan ditempatkan sebagai pegawai, bukan sebagai intelijen yang memata-matai negara."

(Ant/E-1)

Otak Terorisme Divonis 18 Tahun

Negara mengganjar hukuman berat bagi gembong aksi terorisme yang ditangkap di Palembang, Fajar Taslim alias Muhammad Hassan.

Syarief Oebaugh

MAJELIS hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin, memvonis tiga terdakwa kasus terorisme yang ditangkap di Palembang, pada 28 Juni 2008. Fajar yang didakwa sebagai otak aksi terorisme diganjar dengan hukuman 18 tahun penjara.

Sementara itu dua rekan Fajar, Wahyudi alias Yudi alias Roni, 35, dan Ali Mashudi alias Zubir, 26, divonis masing-masing 12 tahun dan 10 tahun penjara.

Dalam aksi kelompok itu Wahyudi diketahui berperan sebagai penyimpan bom yang sudah selesai dirakit. Adapun Ali Mashudi yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh penyadap karet diketahui sebagai perakitan bom yang mendapat pelatihan langsung dari Fajar.

"Ketiga pelaku telah terbukti melakukan tidak pidana terorisme atau melanggar Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme," tandas Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan.

tan Haswandi.

Dalam berita acara pemeriksaan, ketiga pelaku terorisme itu didakwa membuntuh guru SMP bernama Dago Simamora. Oleh para pelaku, korban dinilai melecehkan ajaran Islam karena melarang muridnya memakai penutup kepala (jilbab).

Dakwaan terhadap kelompok teroris itu diperbarat karena mereka juga merencanakan aksi peledakan sebuah kafe di kawasan Bukit Tinggi, Sumatra Barat. Seusai pembacaan vonis, ketiga pelaku menyatakan menerima putusan tersebut. Kendati akan memikirkan lebih lanjut, mereka belum berniat mengajukan banding.

Selang enam hari sebelumnya, majelis hakim di PN Jakarta Selatan yang diketuai oleh Syamsuddin juga telah menentukan vonis bagi anggota lain kelompok Palembang, Abdurrohman Thaib alias Musa alias Kosim alias Ivan, 35, yang berperan sebagai perakitan bom, dan Ki Agus Muhammad Toni, 30, yang bertugas menyimpan bom, masing-masing dikenai 12 tahun penjara.

Vonis yang diberikan majelis hakim itu lebih ringan tiga tahun jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa yakni 15 tahun penjara. Dalam berkas tuntutan jaksa menyatakan Musa dan Toni melanggar Pasal 15 jo Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Saat menanggapi putusan majelis hakim, Asludin Hatjani, kuasa hukum kedua terdakwa, menyatakan pihaknya menye-



ANTARA/DMAS

SIDANG TERORISME: Tiga terdakwa teroris Palembang Muhammad Hassan alias Fajar Taslim (kanan), Ali Mashudi (tengah), dan Wahyudi mendengarkan pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. Fajar Taslim divonis 18 tahun, Ali Mashudi divonis 10 tahun, sedangkan Wahyudi divonis 12 tahun.

rahkan keputusan upaya banding kepada keluarga Musa dan Toni. Hanya saja, dia menilai putusan yang diberikan majelis hakim sangat mempertaruhkan dan berlebihan.

Terungkapnya aksi terorisme yang dilakukan kelompok Palembang itu bermula dari adanya permintaan bantuan kepolisian Singapura untuk menangkap buron jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI), Mas Slamet Kastari. Slamet lari dari Singapura pada 2007.

Polisi menangkap tersangka Muhammad Hassan yang di-

duga merupakan salah satu ahli bom JI Singapura, di Sekayu, Muara Banyu Asin. Polisi juga menetapkan status tersangka bagi sembilan orang lainnya yang ditangkap dalam penggerebekan pada 2 Juli 2008.

Lima anggota lain kelompok teroris Palembang juga telah dijatuhi hukuman kurungan. Vonis kepada mereka bervariasi, mulai empat tahun hingga 18 tahun.

Kelima anggota lainnya itu adalah Sugiharto alias Sugih alias Raja, 22, mahasiswa IAIN Raden Fatah yang mendapat

pelatihan merakit bom dari Muhammad Hassan. Lalu, Agustiawarman alias Abu Taskia alias Junaedi, 36, PNS di Balai Pemasyarakatan Sumsel yang bertugas menyimpan bom. Selanjutnya, Heri Purwanto alias Abu Hurairah alias Heri, 25, wiraswastawan yang bertugas menyimpan bom, Anis Sugandhi alias Abdullah Huser alias Ustaz Gandhi, 42, pemimpin sebuah ponpes, dan Sukarsu Abdillah alias Abdurahman, 28, guru ponpes. (J-4)

oebay@mediaindonesia.com

3.2.2(Artikel dalam koran *Media Indonesia* edisi Rabu, 29 April 2009)

DINAMIKA

KPK Ajukan Kasasi Tiga Mantan Anggota DPR

KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan tiga mantan anggota DPR yang menjadi terpidana kasus korupsi.

Tiga terpidana itu, Anthony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu atas kasus Aliran dana BI, serta Al Amin Nasution dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang, Sumsel. Direktur Penuntutan Ferry Wilbison menyampaikan hal itu di Jakarta, kemarin.

"Kami telah mengajukan kasasi ke MA karena pertimbangan penerapan hukumnya," jelas Ferry melalui telepon selulernya.

Menurut Ferry, dalam kasus Hamka Yandhu dan Anthony Zeidra Abidin terdapat pasal-pasal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dalam menjatuhkan putusan.

PT Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun untuk Anthony dan 3 tahun untuk Hamka. Padahal, di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memvonis Anthony Zeidra Abidin 4,5 tahun dan Hamka Yandhu 4 tahun penjara. Alasan majelis hakim memperberat hukuman Anthony karena dianggap sebagai inisiatör yang meminta bantuan dana bagi perbaikan citra BI di DPR.

Sementara itu, kasasi terhadap Al Amin Nasution terkait dengan uang pengganti yang harus dirampas oleh negara. Karena sebelumnya dalam pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat tinggi Al Amin tidak dibeberi hukuman denda untuk mengembalikan kerugian negara. (AO/P-2)

3.2.3 Artikel dalam koran *Media Indonesia* edisi Rabu, 29 April 2009)

Indonesia Pertahankan Saham di ADB

INDONESIA akan mempertahankan kepemilikan sahamnya pada lembaga keuangan internasional Asian Development Bank (ADB) di posisi terbesar keenam. Untuk itu, Indonesia siap ikut ambil bagian dari rencana penambahan modal ADB sebesar 200%.

"Dari sisi Departemen Keuangan sebagai Gubernur ADB mewakili Indonesia, kita akan fokus dalam bagaimana menjaga *share* dari Indonesia sebagai *shareholder* terbesar keenam, tidak mengalami dilus," kata Menteri Keuangan sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, sejak bergabung di ADB pada 1966, saham Indonesia di ADB adalah sebanyak 192.700 atau 5,43%. Sementara itu, hak suara Indonesia di ADB adalah sebanyak 205.932 atau 4,65%.

Sementara itu, saat ditanya mengenai pengambilalihan saham India yang tidak ingin ikut serta dalam penambahan modal ADB, Menkeu belum mau berkomentar apakah akan mengambil alih saham India tersebut. Sebab untuk rencana penambahan modal ADB ini, Indonesia akan menyampaikan rencananya kepada DPR lebih dulu.

"Karena dia terimplikasi pada anggaran, akan kita sampaikan kepada Dewan melalui UU APBN-P 2009 atau APBN 2010 bahwa dia pembayarannya mulai 2010," ujarnya.

Yang pasti, ujar dia, kalau ada negara yang tidak mau mengambil bagiannya, bagian itu akan bisa diambil alih negara lain.

Sebagaimana diketahui, ADB memang berencana untuk meningkatkan modalnya sebesar 200% menjadi sekitar US\$100 miliar-US\$150 miliar, yang akan disetujui pada pertemuan ADB di Bali awal Mei 2009 ini. (Tup/E-2)

3.2.4 dan 3.2.5 (Artikel dalam koran *Media Indonesia* edisi Rabu, 29 April 2009)

Akhirnya Golkar dan PDIP Sepakat Koalisi Besar

Para ketua umum akan bertemu untuk menentukan capres.

Mahfud

PARTAI Golkar dan PDIP akhirnya menyetujui rencana pembentukan koalisi besar dengan melibatkan Hanura, Gerindra, PAN, dan PPP. Koalisi itu bertujuan membangun pemerintahan yang kuat dan stabil.

Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan Tim Enam Golkar dan Tim Enam PDIP di Hotel Nikko Jakarta, kemarin. PDIP diwakili Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, dan Sabam Sirait. Golkar diwakili Soemarsono, Burhanuddin Napitupulu, dan Syamsul Muarif.

Pramono mengatakan pertemuan belum menghasilkan keputusan mengikat. Baru sebatas menyampaikan persepsi koalisi yang akan dibangun. Tapi, menurut Pramono, pintu arah koalisi tetap terbuka lebar. Soal siapa yang akan menjadi nomor satu atau dua belum diputuskan. "Salah satu pihak harus mengalah. Tidak mungkin dua-duanya menjadi capres," kata Pramono.

PDIP telah menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Partai Golkar mengusung Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Megawati dan Jusuf Kalla sudah bertemu sebelum dan sesudah pemilu legislatif. Keduanya juga sepakat membangun pemerintahan yang kuat. Untuk itulah, hari ini direncanakan para ketua umum partai yang akan berkoalisi itu bertemu.

Pramono mengatakan koalisi besar itu membutuhkan kebesaran hati dari para pucuk pimpinan partai untuk duduk bersama dan menyatakan visi. "Karena saat ini kita sudah pada fase pengambilan keputusan," ujarnya.

Ia tetap optimistis bahwa pertemuan para ketua umum tersebut akan berhasil menyelesaikan nama yang diajukan sebagai calon presiden. "Nama akan muncul dalam satu hingga dua hari," ujarnya.

Tawar-menawar

Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan paling lambat pada 3 Mei partainya akan mengumumkan koalisi. "Jadwalnya paling lambat 3 Mei harus diumumkan," katanya saat memberikan keterangan pers di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan saat ini partainya sedang dalam proses menuju arah koalisi dengan parpol lain. Menurut dia, tim enam partai itu sedang melakukan pertemuan intensif dengan PDIP. Ketika ditanyakan apakah Partai Golkar tetap bersikukuh mengajukan calon presiden, sama dengan yang dilakukan PDIP, Kalla mengatakan dalam negosiasi selalu ada tawar-menawar.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat

Peta Kekuatan Koalisi



PDIP Taufiq Kiemas mengatakan yang terpenting saat ini adalah terbentuknya koalisi PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura, dan PPP. Setelah koalisi lima partai benar-benar terbentuk, baru penentuan capres dibahas bertiga antara Megawati, JK, dan Prabowo. "Jangan belum apa-apa membicarakan capres, bisa bubar rencana koalisi," katanya.

Rencana PAN bergabung dalam koalisi besar itu baru terungkap kemarin setelah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir. Pertemuan itu berlangsung tertutup. Padahal, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais sudah mengimbau pimpinan PAN agar melakukan koalisi dengan parpol pemenang pemilu legisla-

tif. Bagi Amien, berkoalisi dengan pihak yang kalah merupakan kemubaziran.

PPP pun belum kompak menentukan arah koalisi. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Bachtiar Chamsyah menilai PPP tidak akan mendukung Prabowo sebagai capres. Alasannya, suara Gerindra yang mengusung Prabowo lebih sedikit daripada PPP dalam pemilu legislatif. Akan tetapi, sebanyak 28 dari 33 DPW PPP justru mendukung Prabowo untuk menjadi capres.

Sama seperti PAN, PPP pun hingga kini belum menetapkan arah koalisi. Mengenai kemungkinan PPP bergabung ke Golkar, Bachtar menyatakan hal itu belum ditentukan. (Tim/Ant/X-8)

mahfud@mediaindonesia.com

3.3.1, 3.3.2, dan 3.3.3 (Artikel dalam koran *Media Indonesia* edisi Kamis, 30 April 2009)

Pasukan Yonif 751 Mengamuk di Jayapura



TIDAK PUAS: Sejumlah tentara Yonif 751 menyalaikan api di depan markas mereka di Sentani, Jayapura, Papua, kemarin.

Kemarahan prajurit dipicu pemotongan gaji oleh komandan batalyon untuk iuran pengiriman jenazah.

Folmer Marisi

WAJAH TNI kembali tercoreng. Aksi unjuk rasa yang digelar hampir seratus anggota TNI di Markas Batalyon Infanteri (Yonif) 751/Wira Jaya Sakti (WJS), Jalan Raya Sentani, Jayapura, Papua, kemarin pukul 12.45 WIT, berakhir rusuh.

Ratusan tentara mengamuk, merusak sejumlah fasilitas markas batalyon, merampas senjata, dan menghancurkan

kamera milik wartawan yang akan meliput peristiwa tersebut. Keberingasan mereka membuat suasana Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, tegang. Pertokoan di sepanjang Jalan Raya Sentani sempat tutup.

Informasi yang dihimpun *Media Indonesia*, aksi anggota TNI Batalyon 751 berasal dari kematian Prajurit Satu Joko, anggota TNI Yonif 751/WJS, karena sakit pada 28 April. Prajurit batalyon meminta agar jenazah rekannya itu dibawa ke Kabupaten Nabire untuk derahan ke pihak keluarga.

Total biaya pengiriman jenazah Pratu Joko sebesar Rp30 juta. Namun, Komandan Batalyon (Danyon) Yonif 751/WJS Letkol Lambok Sihotang hanya menyanggupi biaya pengiriman jenazah sebesar Rp5 juta. Sisanya Rp25 juta diambil dari potongan gaji 156 personel TNI

Yonif 751/WJS yang dipotong sebesar Rp20 ribu/anggota setiap bulannya hingga menutupi keseluruhan biaya tersebut.

Selain itu, Danyon Letkol Lambok Sihotang menolak permintaan anak buahnya agar jenazah Pratu Joko disematamkan di Mako Yonif 751/WJS. Jenazah Pratu Joko hanya disematamkan di rumah duka. Tak terima dengan keputusan danyon, prajurit batalyon mengamuk.

Yonif 751/WJS yang dipotong sebesar Rp20 ribu/anggota setiap bulannya hingga menutupi keseluruhan biaya tersebut.

Akumulasi kekecewaan
Kemarahan prajurit sebenarnya disebabkan kekesalan yang akumulatif. Prajurit kesal sebab uang makán dan uang-uang lainnya yang seharusnya menjadi hak mereka dipotong donyon.

"Kasus pemotongan hak-hak anggota ini sudah terjadi beberapa lama dan hari ini (kemarin) mereka melampiaskan kekesalannya," kata Kepala Penerangan Kodam XVII Letkol Inf Susilo.

La membenarkan bahwa sempat ada letusan senjata dalam kasus itu, namun tidak menyebabkan jatuhnya korban. "Ada lima kali senjata meletus, tapi

tidak ada yang luka," katanya.

Menjelang sore, ketegangan mulai mereda. Para anggota TNI Yonif 751/WJS meminta Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Azmin Yusri Nasution bertemu dengan mereka untuk menyampaikan aspirasi kekecewaan. Pangdam berjari-jari akan memproses secara hukum Danyon Infanteri 751 Sentani Letkol Inf Lambok Sihotang.

Bila benar danyon melakukan kesalahan, ia akan dicopot dari jabatan. Pomdam XVII/Cenderawasih juga akan mengusut pelaku aksi anarkistik. "Mereka akan dikenai sanksi indisipliner," tegas Kapendam.

Rencananya, hari ini KSAD Jenderal Joko Sasongko akan tiba di Jayapura dan berdialog dengan personel TNI.

(Hde/DM/X-4)

folmer@mediaindonesia.com

3.3.4 (Artikel dalam koran *Media Indonesia* edisi Kamis, 30 April 2009)

Perppu Pemilu Disetujui lewat Voting

SETELAH sempat *deadlock*, pengesahan RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemilu disahkan dalam sidang paripurna 29 April 2009 melalui mekanisme voting.

Dari 263 anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin, 186 anggota menyatakan setuju termasuk Ketua DPR Agung Laksono. Yang tidak setuju sebanyak 67 anggota dan 10 anggota menyatakan abstain.

Rapat paripurna pada 28 April, pembahasan gagal mencapai kesepakatan. Karena itu, rapat ditunda hingga kemarin. Dalam rapat paripurna kemarin, terjadi perubahan dukungan. F-BPD DPR yang sehari sebelumnya menolak perppu akhirnya menerima dengan catatan keberatan.

Perppu No 1/2009 merupakan pengganti UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu. Perppu tersebut mengatur perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan penandaan surat suara lebih dari satu kali. (*/P-1)

3.4.1 (Artikel dalam koran *Media Indonesia* edisi Jumat, 1 Mei 2009)

Pesawat Latih Jatuh, Instruktur Tewa

NICOLAS Burung, 25, instruktur penerbangan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Kabupaten Tangerang, kemarin tewas, setelah pesawat latih Cessna Downer buatan Amerika, jatuh.

Pesawat bernomor bodi PK/ANW yang diterbangkan bersama dua siswanya, Kevin Manurung dan Yeni, jatuh di Kampung Blok Empang RT 05/01, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Bogor.

Mama Yeni, 52, saksi mata yang ditemui di RSUD Tangerang mengatakan pesawat itu jatuh saat hujan deras dan angin besar.

"Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Waktu itu saya sedang

bersih-bersih di dapur. Saya kira ada tabung gas tetangga yang meledak," kata Yeni.

Saat keluar rumah, ia melihat ada pesawat yang tergeletak di kebun bambu yang berjarak 100 meter dari belakang rumahnya. Beberapa tetangganya terlihat berusaha mendekat ke pesawat tersebut.

"Saya melihat dua siswa sudah ada di luar pesawat. Sebaliknya Nicolas, yang dada dan kakinya terjepit badan pesawat, sulit dikeluarkan," kata Mama Yeni yang kaus putihnya dipenuhi bercak darah korban.

Setelah dikeluarkan dengan paksa, Nicolas dan Kevin yang mengalami luka di bagian ke-

pala, serta Yeni yang patah tangan kiri dibawa ke Puskesmas Tenjo. Tapi karena peralatan di puskesmas itu minim, ketiga korban dirujuk ke RS Siloam, Karawaci, Tangerang.

Di tengah perjalanan, Nicolas selalu muntah darah. Ia pun tidak bertahan dan meninggal dalam perjalanan.

"Sepanjang perjalanan almarhum ngamuk-ngamuk sambil muntah darah. Saat sampai pintu tol Bitung, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari RS Siloam, ia meninggal," katanya.

Nicolas lalu dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Adapun dua siswanya tetap dirawat di RS Siloam.

Bagus, salah satu instruktur penerbangan STPI mengatakan pesawat itu tewa karena cuaca buruk. Pada sebelum pesawat tersebut bangkrut oleh korban, Bagus menerbangkannya tadi: "Kondisi pesawat sehat," kata Bagus.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan (Dephub) Bambang mengatakan pesawat itu saat berusaha mendarat.

Ia juga mengatakan pesawat digunakan latihan *take off-landing* dari Budiarto, Curug. "Ba-tiba cuaca berubah b

ujarnya. (SM/DD/J-2)

Rupiah Dekati Rp10.500 IHSG Tembus 1.700

SENTIMEN positif yang dihembuskan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) tentang kontraksi yang melambat di negara tersebut telah mendorong gairah pelaku pasar sepanjang perdagangan kemarin.

Termasuk di Indonesia, euphoria pasar telah mendorong rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) naik signifikan.

Rupiah mengalami kenaikan cukup besar, ditutup di posisi Rp10.570 per dolar AS. Padahal, di awal perdagangan, rupiah masih di posisi Rp10.805 per dolar AS. Demikian pula IHSG, ditutup menguat 78,58 poin (4,77%), menembus posisi 1.700. IHSG ditutup di level 1.722,77.

Menurut pengamat pasar uang Edwin Sinaga, penguatan rupiah dipicu pelaku asing yang diikuti pelaku lokal. "Mereka memperkirakan krisis keuangan global mulai berkurang."

Dia memperkirakan rupiah akan terus bergerak naik karena sentimen po-

sitif yang terjadi sejak pagi hingga sore semakin kuat. Hal itu terjadi karena pasar Indonesia dinilai masih dapat memberikan keuntungan lebih baik.

Selain sentimen global, pengamat pasar modal Felix Sindhunata menambahkan, kenaikan IHSG juga dipicu optimisme pasar atas kinerja perbankan di Indonesia. "Kemarin kan Bank Mandiri, BCA (Bank Central Asia), dan BRI (Bank Rakyat Indonesia) telah mengeluarkan laporan keuangan mereka. Hasilnya mayoritas bagus. Ini menjadi sentimen positif tersendiri bagi market," jelasnya.

Dengan laporan keuangan yang baik tersebut, pasar memprediksi suku bunga perbankan akan mampu menyesuaikan suku bunga acuan BI yang saat ini berada di posisi 7,5%. Dengan demikian, bank mampu menyalurkan kredit dengan suku bunga menarik.

Kondisi politik yang aman, menurutnya, juga menyebabkan pelaku pasar tenang dan tidak ragu-ragu dalam bertransaksi. (DU/Ant/E-1)

3.4.3 (Artikel dalam koran *Media Indonesia* edisi Jumat, 1 Mei 2009)

Stadion Futsal Ambruk 2 Tewas

KONSTRUKSI stadion futsal yang sedang dibangun di Desa Tanjung, Kecamatan Tirtod, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, ambruk yang mengakibatkan 20 pekerja tertimpak reruntuhan bangunan, kemarin.

Dua di antaranya, yaitu Kuntari, 60, warga Desa Pandanarum, Kecamatan Tirtod dan Fuad, 36, warga Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, tewas.

Peristiwa ambruknya stadion tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Warga dikagetkan dengan ambruknya konstruksi setinggi 40 meter yang dipasang oleh para pekerja: Reruntuhan menutupi sebagian Jl Tanjung.

"Kami tak sempat melarikan diri karena ambruknya konstruksi tiang besi tersebut juga menimpa bangunan lain dan menimpa para pekerja yang sedang sibuk setelah jam istirahat," kata Hakimin, 40, mandor pekerja yang kemarin sore masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton, Pekalongan.

Bangunan stadion yang baru rampung setengah, demikian Wildan, 40, salah seorang warga sekitar, langsung menimpa puluhan pekerja.

Melihat kejadian tersebut, sejumlah pekerja yang selamat bersama warga langsung mencari korban di bawah reruntuhan.

"Ketika mendengar suara gemuruh kita langsung ke lokasi, tapi mendapati suasana yang mengerikan karena puluhan orang berada di bawah reruntuhan tembok dan konstruksi besi," katanya.

Setelah melakukan evakuasi, para korban dilarikan ke rumah sakit. Namun, dua korban menghembuskan napas terakhirnya, sedangkan 13 korban lainnya menderita luka berat dan lima lainnya luka ringan.

Kepala Polresta Pekalongan Ajun Komisaris Besar (AKB) Aris Budiman mengatakan petugas masih melakukan penyelidikan terhadap ambruknya stadion yang baru dibangun tersebut. Menurut dia, selain mengumpulkan keterangan di lapangan.

"Kita juga masih mencari pemilik gedung stadion, Merkury, warga Desa Pandanarum, Kecamatan Tirtod, Pekalongan, untuk dimintai keterangan," kata Aris. (AS/N-1)

Stimulus Infrastruktur Deptan Terancam Dicoret

Program stimulus Deptan rencananya masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP)

Dwi Tupani

PEMBAHASAN anggaran stimulus Departemen Pertanian (Deptan) hingga kini belum disetujui DPR.

"Stimulus infrastruktur dari Deptan banyak mengalami perubahan sehingga butuh waktu pembahasan yang lama. Jadi, mungkin stimulus dari Deptan hilang dan masuk APBNP," kata Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panjar) DPR Harry Azhar Azis di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Deptan mendapatkan anggaran stimulus infrastruktur senilai Rp650 miliar. Dana tersebut di antaranya dipergunakan untuk pembangunan jalan desa, irigasi, dan tambak.

Ketua Panjar Emir Moeis mengungkapkan program sti-

mulus yang sudah menjadi kesimpulan rapat kerja pemerintah dan DPR sebelumnya sangat berbeda dengan daftar proyek Deptan yang ada.

Padahal, untuk semua alokasi anggaran belanja stimulus kementerian/lembaga lain sudah tidak ada masalah. Dari sembilan departemen yang mendapat jatah stimulus fiskal, hanya Deptan yang belum mengantongi persetujuan DPR.

Emir mengatakan terlalu banyak proyek yang berbeda. Meski di sisi lain, jumlah anggarannya tidak berubah.

Soal persetujuan untuk stimulus infrastruktur sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan dirinya optimistis stimulus fiskal siap dijalankan dalam waktu dekat. Stimulus fiskal diharapkan mampu meraям dampak perlambatan ekonomi.

"Pada triwulan I, kondisi perekonomian memang masih positif, dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan di atas 4%. Namun, harus terus berjaga-jaga untuk triwulan II dan seterusnya," tegas dia.

Pemerintah, lanjut Menkeu, akan mulai menjalankan sti-

mulus fiskal pada triwulan II. Jika terlalu lama, tidak bisa disebut sebagai stimulus fiskal.

Makin buruk

Rencana dicoretnya program stimulus Deptan akan memperparah jumlah pengangguran. Hal tersebut juga akan memperburuk dampak krisis global di Indonesia. "Deptan itu adalah departemen yang menyentuh rakyat kecil secara langsung. Jadi, kalau dihilangkan, sama saja," kata ekonom Indef Iman Sugema.

Dengan adanya imbas krisis global di Indonesia, angka pengangguran terus naik akibat PHK dari industri yang sudah kolaps. Padahal, para pengangguran cenderung akan kembali ke desa pada saat terkena pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, potensi untuk menyerap tenaga kerja dengan proyek yang ada di perdesaan amat besar, dalam hal ini proyek yang berada di Deptan. "Kan semua proyek Deptan kebanyakan di perdesaan," ungkapnya.

Kehawatiran itu kian menjadi nyata karena pembahasan program stimulus Deptan dalam APBNP baru akan dibahas

dan ditentukan selesai pertengahan tahun ini.

Selain proyek yang bermasalah, nyatanya program stimulus di Departemen Perindustrian dipangkas. Anggaran stimulus berupa bantuan ditanggung pemerintah (BM-DTP) hanya disetujui Rp1,3 triliun. Sebelumnya, dana yang dialokasikan Rp2,5 triliun.

"Fasilitas BM-DTP dialokasikan Rp2,5 triliun. Dari itu yang dialokasikan untuk berada dalam binaan Departemen Perindustrian RI adalah sebesar Rp1,3 triliun," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI.

Terkait dengan PPN, kata Fahmi, pemerintah kan hanya mengalokasikan dana tak lebih dari Rp1 triliun dari rencana awal Rp10 triliun.

"Dengan demikian, hanya sektor industri yang bisa diberikan PPN-DTP, yakni mi-

goreng, ponas bumi, dan bahan bakar nabati. Untuk sektori industri nabati, dana stirr sudah dialokasikan Rp1 miliar," papar dia.

(RR)*

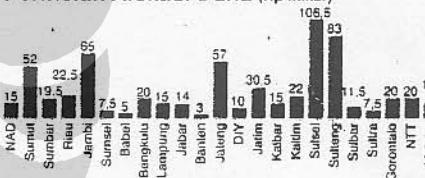
fupani@mediaindonesia.com

Stimulus Fiskal Deptan

■ Total Stimulus
■ Program/Kegiatan

Rp850 miliar
Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur i.e. usaha tanah dan irigasi tingkat usaha lanjut dan sentra produksi perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan; serta irigasi di beberapa kabupaten

Perincian Alokasi Dana (Rp miliar)



Sumber: Raper Panca Anggaran - Pemerintah Golkar, CAR

Kondisi Perekonomian Mulai Tunjukkan Perbaikan

KONDISI perekonomian terus menunjukkan perbaikan meski masih berada di bawah tekanan. Bila dibandingkan dengan data triwulan dan ta-

mencatat kinerja ekspor Indone-sia pada Maret 2009 mencapai US\$8,54 miliar atau naik 20,64% ketimbang Februari 2009.

Hal yang sama terjadi pada impor yang naik tipis 9,94% pada Maret jika dibandingkan dengan Februari 2009 menjadi US\$6,53 miliar. Karena itu pada neraca perdagangan Maret 2009 terjadi surplus US\$2 miliar.

"(Kenaikan ekspor) itu berlaku meski naiknya jika dibandingkan Februari. Sebab, jika dibandingkan dengan Maret 2008, ekspor Indonesia selama proses pemulihan.

Badan Pusat Statistik (BPS)

Maret 2009 masih sangat rendah yaitu turun 28,87%," kata Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, kemarin.

Pada bulan Maret, ekspor nonmineral mengalami kenaikan 20,08% menjadi US\$7,27 miliar ketimbang Februari 2008. Namun jika dibandingkan dengan Maret 2008, ekspor nonmineral tersebut turun 25,69%.

"Mudah-mudahan ini tanda

tingginya ekspor bahan bakar mineral, khususnya ekspor batu bara dan minyak sawit naik. Nilai ekspor batu bara tidak turun terus. Untuk kinerja industri besar dan sedang, pertumbuhan bulanan telah menunjukkan peningkatan. Sepanjang triwulan I 2009, produksi industri pengolahan besar dan sedang mengalami pertumbuhan yang positif pada bulan Februari dan Maret 2009.

Rusman mengatakan, per-

tumbuhan produksi industri

pada bulan Februari naik 0,24%

dari bulan Januari 2009. Pada

bulan Maret 2009 pertumbuhan

industri naik 0,77% dari bulan

Februari 2009. (Tup./* /E-2)

Koalisi Besar Sepakat Kerja Sama di Parlemen

Capres dan cawapres belum dibahas dalam koalisi 10 partai.

Mahfud

KOALISI besar dideklaraskan kemarin. Sebanyak 10 partai yang tergabung dalam koalisi baru menyepakati untuk kerja sama di parlemen. Pasangan capres dan cawapres belum dibahas.

Deklarasi ditandai penandatanganan empat butir kesepakatan. Pertama, menjaga dan memelihara Indonesia sebagai negara yang berbinera tunggal ika dan berideologi Pancasila. Kedua, mempertahankan negara tetap mandiri, memiliki jati diri, dan berdaulat secara ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, membangun pemerintahan Indonesia dengan memperkuat institusi partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Keempat, membangun kerja sama politik di DPR RI, DPR provinsi, dan DPR ka-

bupaten/kota guna lebih mempererat kebersamaan dan memperkuat kerja sama.

Para pemimpin partai yang meneken kesepakatan itu adalah Ketua Umum Partai Hanuro Wiranto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pembina Gerinda Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Selain itu, Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi, Ketua Umum PKNU Choirul Anam, Ketua Umum PPRN Amefia Yani, Sekjen PDS Ferry S Regor, Ketua Umum PPNU Andi Irifan, dan Sekjen Partai Buruh Sonny Puji Sasono.

Mengenai capres dan cawapres, Jusuf Kalla dan Megawati mengatakan pematangan akan terus berlanjut ke tahapan berikutnya, terutama mengenai kemungkinan berkoalisi menggunakan capres-cawapres.

"Kami akan menunggu hasil penghitungan akhir KPU. Sete-



Chozin Chumaidi dan Ketua DPP Lukman Hakim Saifuddin. Sebaliknya, PAN tidak mengiringkan perwakilannya.

Pada hal sebelumnya tersiar kabar PAN akan ikut bergabung dengan koalisi besar. Bahkan, Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung, kemarin, menyebutkan PAN adalah salah satu partai yang diundang untuk melakukan deklarasi bersama.

Chozin Chumaidi mengatakan kehadirannya untuk menjelaskan sikap PPP yang menyatakan tak memberikan mandat kepada ketua umumnya untuk melakukan koalisi di parlemen, seperti yang disepakati dalam koalisi besar.

"Saya datang untuk menyampaikan alasan ketidakhadiran Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Dalam rapimnas, partai memberikan mandat kepada saya untuk melakukan komunikasi dan lobi politik dalam rangka pencapaian, bukan koalisi di parlemen. Makanya kami tidak ikut dalam koalisi besar ini," tukasnya.

Soal langkah Suryadharma yang berkunjung ke Teuku

Umar dan menyatakan sia berkoalisi, Chozin mengatakan "Itu bukan tindakan sepihak Itulah dinamika politik, ke nyataan sekarang seperti itu."

Pengamat politik LIPI Sit Zahro dalam diskusi di Jakarta, kemarin, menilai keberadaan koalisi itu justru menguatkan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai capres.

"Koalisi besar yang tidak mengarah ke capres dan cawapres akan membuat SBY semakin kuat. Mestinya dibuat formulasi siapa yang akan dimajukan sebagai capres. Sayangnya tidak bisa. Ini akan membuat SBY makin kuat dan sulit dihadapi," paparnya.

Adapun Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry menilai Megawati sebutnya mundur sebagai capres dan menyerahkannya kepada Prabowo dan Rizal Ramli.

"Itu kombinasi yang paling tepat karena Rizal Ramli <plus argumen," kata dia.

(/ NJ/X-8)

mahfud@mediaindonesia.com

Setelah koalisi baru bicara capres, besok baru akan dimulai.

Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum PDIP

lah itu akan dibicarakan," kata Megawati. Kalla menambahkan, "Dalam koalisi ada dua langkah. Yang pertama, menyampaikan prinsip pokok. Setelah itu baru bicara capres, besok baru akan dimulai."

PAN dan PPP

PAN dan PPP tidak ikut mendatangi deklarasi koalisi besar tersebut. Meskipun tidak ikut mendatangi deklarasi, PPP mengirimkan utusan, yakni Wakil Ketua Umum PPP

Harus Ada Status Dugaan Korupsi TI KPU

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menelusuri dugaan korupsi teknologi informasi (TI) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Tabulasi Nasional Pemilu 2009, terutama segera menetapkan status dugaan korupsi TI tersebut.

Desakan itu disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam tim Independent Monitoring Organization (IMO), di Media Center Badan Pengwas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, kemarin.

"KPK harus mempercepat penelusuran terkait korupsi TI dan menetapkan statusnya. Sudah

harus ada perkiraan kerugian negara dan orang yang bertanggung jawab karena KPK sudah melakukan penyelidikan selama seminggu," tegas Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam selaku anggota IMO.

Hadir anggota IMO lainnya, yakni Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Roy Salam, Direktur Indonesian Parliamentary Center Sulastio, dan Direktris Initiative Institute Elizabeth Koesrini.

Menurut Roy Salam, KPK

dalam menangani kasus dugaan korupsi di lingkungan KPU itu, tetapi bertindak profesional dan menjaga kemandirian selama proses penyelidikan. Dia mengingatkan, juga perlu diperjelas soal dana TI pemilu legislatif tersebut.

"Memang perlu diperjelas, barangkali Abdul Aziz (anggota KPU) bisa benar. TIPileg 37,7 miliar, itu untuk manual dan elektronik," kata Roy Salam. Catatan Fitra mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009 terdapat anggaran pengadaan jaringan TI Rp28 miliar, operasional media center 2,8 miliar.

"Namun, ada juga di kabupaten/kota kurang lebih 287,2 miliar. Dana sebesar itu patut diduga merugikan negara karena data hasil TI real count yang ditampilkan sangat minim," cetusnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Abdur Hafiz Anshary mengatakan dirinya telah menandatangani surat Pengantar Penyerahan seluruh data terkait pengadaan barang dan jasa pemilu legislatif kepada KPK.

"Seluruh data pengadaan barang dan jasa kami serahkan ke KPK. Surat pengantaranya sudah saya tanda tangani."

(KN/P-2)

Kejagung Umumkan Status Tersangka Antasari

KEJAKSAAN Agung mengumumkan status tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam kasus dugaan pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Barajar Nasrudin Zulkarnaen. Berencana Nasrudin. Salah satu tersangka dari pelaku intelektual adalah Antasari Azhar," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Jasman Pandjaitan di Gedung Bundar, kemarin.

Patahal, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan di kepolisian. Inilah untuk pertama kalinya status tersangka seseorang yang diduga terkait dengan

Pengacara Antasari Ari Yusuf Emir, membantah penetapan kliennya sebagai tersangka. "Kami sudah menerima surat pemberitahuan dari Mabes Polri bahwa penyidik Polri sudah menyidik pembunuhan berencana Nasrudin. Salah satu tersangka dari pelaku intelektual adalah Antasari Azhar," surat yang menyatakan sebagai tersangka," ungkapnya.

KPK juga menerima tembusan surat yang menyebutkan bahwa Antasari sebagai saksi.

Polisi telah menetapkan sembilan orang tersangka kasus pembunuhan Nasrudin. Tujuh orang telah ditangkap, termasuk Komisaris Utama PT Pers Indonesia Merdeka Sigrid Haryo Wibisono.

Sumber *Media Indonesia* menyebutkan salah seorang tersangka lainnya adalah mantan Kapolres Jaksel berinisial WV. Jasman juga menyebutkan Antasari sudah dicekal mulai kemarin (1 Mei 2009). Surat

permohonan pencekalan itu, lanjut Jasman, dilayangkan Mabes Polri pada 30 April. Keterangan berbeda disampaikan Direktur Penindakan Keimigrasi Dirjen Imigrasi Depkum dan HAM Muchdi. Menurut dia, permintaan cekal berasal dari Jaksam Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Wisnu Subroto secara lisani. "Rabu pukul 17.30 WIB, saya ditelepon JAM-Intel untuk melakukan pencekalan." (Tim/X-10)

3.6.1(Artikel dalam koran *Media Indonesia* edisi Minggu, 3 Mei 2009)

Siswa Indonesia Raih Dua Emas

BERTEPATAN dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), kemarin, Indonesia mendapat hadiah istimewa di ajang Olimpiade Fisika Asia (Asian Physics Olympiad, APhO) ke-10 di Thailand.

Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) meraih penghargaan tertinggi dalam eksperimen fisika (*the best experiment*) sekaligus 2 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu di ajang yang digelar pada 22 April hingga 2 Mei itu.

"Nama Indonesia juga diharumkan dengan penghargaan tertinggi dalam bidang eksperimen sekaligus meraih dua medali emas, perak, dan perunggu," kata Dewan Pengurus Tim TOFI Yohanes Surya ketika dihubungi *Media Indonesia*, kemarin.

Medali emas diperoleh Winson Tanputraman, siswa SMAK 1 BPK Penabur, DKI Jakarta, dan Dzuhri Radityo Utomo dari SMAN 1 Yogyakarta. Winson juga mendapat penghargaan sebagai yang terbaik di bidang eksperimen.

Medali emas yang diraih tahun ini memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan

tahun lalu di Mongolia. Ketika itu, Indonesia membawa pulang tiga medali emas.

Meski begitu, pelajar SMA Indonesia itu telah membanggakan nama Indonesia karena meraih tim terbaik bidang eksperimen dari seluruh tim peserta.

Dengan keberhasilan itu, membuka peluang tim Indonesia untuk tampil di Olimpiade Fisika Dunia di Meksiko pada Juli 2009.

Di Olimpiade Fisika Asia, Indonesia mengirimkan delapan siswa yang dipimpin Hendra Kwee dan Kamsul Abrah. Mereka yang dikirim itu telah melalui proses penyaringan yang sangat ketat dan melibatkan para pembina dari TOFI, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Multimedia Nusantara, dan Universitas Pelita Harapan.

Sebelumnya, siswa Indonesia sukses di International Conference for Young Scientist, 24-29 April, di Pszczyna, Polandia. Indonesia menerjunkan 10 siswa di event itu menyabet 6 emas, 1 perak, 3 perunggu. (Drd/S-3)

ADB Siap Kucurkan US\$3 M

Jumlah penduduk miskin di Kawasan Asia tahun depan akan naik menjadi 100 juta bila krisis ekonomi makin memburuk.

cical support facility (CSF) itu tinggal menunggu persetujuan dewan direktur ADB. "ADB akan menyediakan pinjaman darurat lebih cepat dan lebih murah daripada fasilitas pinjaman ADB yang ada saat ini. Saya yakin fasilitas ini akan disambut dengan baik oleh negara-negara anggota," ujar Kuroda.

ADB memperkirakan dampak buruk dari krisis keuangan global yang masih akan menghantui tahun depan dapat menyebabkan angka penduduk miskin di kawasan Asia naik dari 60 juta menjadi 100 juta.

Untuk itu, ADB memberikan solusi bagi percepatan pendanaan bagi belanja fiskal negara-negara anggotanya untuk menangani dampak krisis global, terutama yang berkaitan dengan penduduk miskin. Presiden Direktur ADB Haruhiko Kuroda saat *media briefing* di Nusa Dua, Bali, kemarin, mengungkapkan pengururan dana yang diramai *country-*

Offering Rate (Libor) plus 200 basis point. Bunga kredit fasilitas yang biasa diberikan ADB umumnya menggunakan Libor plus 400 basis point. Untuk tahun ini dan 2010, Kuroda mengatakan ADB berencana menyediakan dana pinjaman sebesar US\$32,9 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar US\$10 miliar dari dana yang disediakan pada 2007 dan 2008. Selisih sebesar US\$10 miliar inilah yang rencananya digunakan beberapa program penanganan krisis. Rinciannya adalah untuk pembiayaan perdagangan (*trade financing*) US\$1 miliar, CSF US\$3 miliar, dan US\$6 miliar untuk dana infrastruktur.

Dalam kesempatan itu, Kuroda juga mengatakan ADB telah menyetujui pinjaman untuk Indonesia sebesar US\$1 miliar. Dana ini rencananya akan digunakan untuk proyek infrastruktur, jaring pengaman sosial, dan stimulus fiskal.

Perlu perbaikan

Sedikitnya tiga Serikat Pekerja Global seperti UNI Global Union, Public Service International (PSI), dan Building and Wood Worker's International (BWI) mendesak ADB untuk memperbaiki arsitektur keuangan yang berbasis pengurangan kemiskinan dan Pengangguran.

"Jumlah kemiskinan dan pengangguran akan terus naik jika arsitektur keuangan ADB masih bersifat konvensional, yakni memburu keuntungan melalui mekanisme pasar bebas," kata Sekretaris Regional UNI Asia Pacific, Christopher NG. Pernyataan bersama para LSM itu disampaikan langsung kepada Kuroda pada 42nd Annual Meeting Board of Governors Asian Development Bank di Nusa Dua, Bali. Pinjaman dari ADB yang masih bersifat tradisional, lanjutnya, akan berdampak negatif pada upaya pengurangan kemiskinan.

an. "Itu sebabnya para NGO menyatakan langkah mendekat ADB untuk lebih fokus pada orientasi pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Sementara itu, ratusan elemen masyarakat yang tergabung dalam Asian People Movement Against ADB, kemarin, menggelar aksi protes di Konsulat Jepang yang ada di Renon, Denpasar. Menurut koordinator aksi Ngurah Karyadi, kehadiran ADB tidak membuat negara anggotanya semakin kaya dan tingkat kesejahteraannya meningkat. Yang ada masyarakat semakin melarat dan negara terjerat utang serta pencemaran lingkungan lainnya.

ririn@mediaindonesia.com

Ririn Radiawati



SIA Development Bank (ADB) menyiapkan dana sebesar US\$3 miliar yang dapat dipergunakan negara-negara anggotanya untuk menangani dampak krisis global, terutama yang berkaitan dengan penduduk miskin. Presiden Direktur ADB Haruhiko Kuroda saat *media briefing* di Nusa Dua, Bali, kemarin, mengungkapkan pengururan dana yang diramai *country-*

ASEAN+3 himpun US\$120 Milliar

China, Jepang, dan Korsel akhirnya setuju *polling* dana tindak lanjut Chiang Mai Initiative.

Ririn Radiawati Kusuma

PERTEMUAN menteri Keuangan ASEAN+3 menyepakati penghimpunan dana sebagai tindak lanjut Prakarsa Chiang Mai sebesar US\$120 miliar beserta iuran setiap negara.

"Jepang, China, dan Korea Selatan, yang sebelumnya belum setuju, dalam pertemuan hari ini setuju," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers seusai pertemuan menteri keuangan ASEAN+3 di Nusa Dua Bali,

kemarin. Menteri Keuangan merinci, Jepang dan China sepakat memberikan iuran masing-masing US\$38,4 miliar dan Korea Selatan US\$19,2 miliar sehingga jumlah dari tiga negara itu mencapai US\$96 miliar.

Sementara itu, iuran ASEAN+3 (Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Brunei) masing-masing US\$4,77 miliar, Filipina US\$3,68 miliar, dan sisanya dari anggota lain ASEAN. "Jumlah iuran ASEAN (10) sebesar US\$24 miliar," kata Sri Mulyani.

Dalam pertemuan itu juga disepakati hak suara Jepang, ASEAN (10), dan China mendapat 28,4%, sedangkan Korea Selatan 14,77%. Ia juga menyatakan telah disepakati aturan memperoleh dana itu dan pengawasannya.

"Disepakati dibentuk satuan pengawas mandiri bekerja

sama dengan ADB (Bank Pembangunan Asia)," kata Menteri Keuangan.

Menurut dia, ASEAN+3 menyepakati pengumpulan dana tindak lanjut Prakarsa Chiang Mai itu digiatkan sebelum akhir 2009. "Tingkat deputi akan menyelesaikan seluruh dokumen sehingga itu dapat dilaksanakan di setiap negara," katanya menjelaskan.

Pinjaman Indonesia, kata Menkeu, juga bisa mendapat pinjaman dari kumpulan dana di ASEAN+3 hingga US\$11,925 miliar dalam keadaan tertentu. "Setiap negara ASEAN dapat memperoleh 2,5 kali jumlah iuran sehingga Indonesia dapat memperoleh US\$11,925 miliar," kata Sri Mulyani.

Country Director ADB Resi-

nyiapkan dana hingga US\$2 miliar untuk membantu Indonesia, termasuk untuk menghadapi dampak krisis global.

"Tambahan modal dari US\$65 miliar menjadi sekitar US\$165 miliar akan meningkatkan kemampuan ADB pada tahun ini, pinjaman untuk Indonesia mencapai sekitar US\$1,5 miliar hingga US\$2 miliar," kata Nugent dalam jumpa pers bersama Managing Director ADB Rajat Nag dan Director General Southeast Asia Development ADB Arjun Thapan.

Nugent merinci, bantuan ADB kepada Indonesia itu meliputi pinjaman siaga US\$1 miliar untuk membantu pengeluaran belanja Pemerintah Indonesia jika diperlukan. Pinjaman lain untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri US\$65 juta dan bantuan untuk pembi-

ayaan pembangunan prasarana sebesar US\$140 juta.

Di sela-sela pertemuan ADB, kemarin, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Asian Peoples Movement Against ADB berunjuk rasa di depan Konjen Amerika, Jl Hayam Wuruk Denpasar.

Mereka mendesak pemerintah Indonesia secara tegas meminta ADB untuk mempertanggungjawabkan secara ekologis berbagai proyek ADB yang berbasiskan lingkungan hidup di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga diminta berhati-hati mengambil pinjaman ADB kalau tidak terlalu mendesak. Bila terpaksa harus mengambilnya, perlu ada pengawasan pembagian keuntungan yang seimbang.

(OL/Ant/X-9)

rini@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 13